



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**KECAMATAN LAMONGAN**

Jalan Andansari No. 47 Kodepos : 62216

Email : [lamongan@lamongankab.go.id](mailto:lamongan@lamongankab.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id/lamongan](http://www.lamongankab.go.id/lamongan)

Lamongan, 10 April 2025

Nomor : 700/143.1 /413.322/2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan I Tahun 2025  
Kecamatan Lamongan  
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan  
I Tahun 2025 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagaimana  
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

  
**CAMAT LAMONGAN**  
**AGUS HENDRAWAN, S.STP., M.AP.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790802 199711 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAN I TAHUN 2025  
KECAMATAN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN LAMONGAN**

Jalan Andansari No. 47 Kodepos : 62216

Email : [lamongan@lamongankab.go.id](mailto:lamongan@lamongankab.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id/lamongan](http://www.lamongankab.go.id/lamongan)

NO DOKUMEN : 700 / 143 . 1 / 413.322/2025

TANGGAL TERBIT : 10 April 2025

Disiapkan Oleh	:	<p>KEPALA SUB BAGIAN UMUM</p>  <p><u>SULUNG NUGROHO MAHANANI, S.E.</u> NIP. 198002172010011002 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS KECAMATAN LAMONGAN</p>  <p><u>MUHAMMAD NUR KHAIRIL HUDA, S.E.</u> NIP. 196906011990031009 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>CAMAT LAMONGAN</p>  <p><u>AGUS HENDRAWAN, S.STP., M.AP.</u> NIP. 19790802 199711 1 001 Ketua</p>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada NAMA OPD Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Lamongan:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan Nilai SAKIP	Camat	Desember 2025	-	Proses
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	Juni 2025	-	Proses
Risiko Operasional OPD Kecamatan Lamongan:						
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Indek Kepuasan Masyarakat	Camat	21 Februari 2025	21 Februari 2025	Sudah
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	31 Desember 2025	-	Proses
3	Meningkatkan Koordinasi antar Sub-Bagian, Seksi dan Sekretaris	Rapat Staf	Camat	31 Desember 2025	-	Proses
4	Pengajuan sesuai tanggal dan petunjuk	Pengajuan Gaji	Camat	31 Desember 2025	-	Proses
5	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monitorong	Camat	31 Desember 2025	-	Proses

	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
6	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat	31 Desember 2025	-	Proses
7	Meningkatkan Monitoring dan Pengusulan ke Dinas terkait	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat	31 Desember 2025	-	Proses
8	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan Desa	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat	31 Desember 2025	-	Proses
9	Lebih teliti dan cermat lagi dalam Verifikasi	Rapat Koordinasi	Camat	31 Desember 2025	-	Proses
10	Mewajibkan pihak ketiga mengirimkan laporan kemajuan (harian/mingguan/bulanan)	Rapat Koordinasi	Camat	31 Desember 2025	-	Proses

**B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

(nama OPD) telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1, yang telah dilaksanakan adalah:, dan yang belum dilaksanakan adalah

	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Lamongan:										
1	Nilai SAKIP Kecamatan Lamongan Turun	RSO.23.99.47.01	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Kurangnya Pemahaman Manajemen Kinerja	Penurunan Nilai SAKIP	Proses	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	31 Desember 2025	-	Proses

	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
2	Jumlah Desa Maju turun	RSO.23.99.47.02	1 April s/d 30 Juni 2025	Kurangnya Pemahaman Manajemen Desa	Penurunan Status Desa	Sudah	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	23 Juni 2025	-	Proses
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Lamongan:</b>										
1	Risiko Pemangku Kepentingan Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik	ROO.23.99.47.01	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal	Sudah	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	21 Februari 2025	Februari 2025	Sudah
2	"Risiko Fraud Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal"	ROO.23.99.47.02	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal	Proses	Pengajuan Penambahan Personil	Desember 2025	-	Proses
3	Menurunnya Nilai Sakip	ROO.25.99.47.03	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Keterlambatan Dokumen SAKIP	Penurunan Nilai SAKIP	Proses	Meningkatkan Koordinasi antar Sub-Bagian, Seksi dan Sekretaris	31 Desember 2025	-	Proses
4	Terlambatnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	ROO.23.99.47.04	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Pengajuan Pembayaran Gaji tidak tepat waktu	Terlambatnya Pembayaran Gaji	Proses	Pengajuan sesuai tanggal dan petunjuk	31 Desember 2025	-	Proses
5	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan umum Kantor	ROO.23.99.47.05	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Inventrisasi tidak Baik	Kebutuhan Kantor tidak terpenuhi dengan baik	Proses	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi	31 Desember 2025	-	Proses



	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
6	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.23.99.47.06	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Kurangnya partisipasi perangkat daerah dalam Rakor	Penurunan Beberapa Status Desa	Proses	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	31 Desember 2025	-	Proses
7	Meningkatnya Pengaduan masyarakat	ROO.23.99.47.07	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Sarana dan Prasarana yang kurang memadai	Kepuasan Masyarakat berkurang	Proses	Meningkatkan Monitoring dan Pengusulan ke Dinas terkait	31 Desember 2025	-	Proses
8	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.23.99.47.08	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Kurangnya partisipasi perangkat daerah dalam Rakor	Penurunan Beberapa Status Desa	Proses	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan Desa	31 Desember 2025	-	Proses
9	Pengajuan tidak dilengkapi dengan berkas yang lengkap	ROO.23.99.47.09	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Verifikasi kurang teliti	Kerugian Anggaran dan SPJ Tidak Lengkap	Proses	lebih teliti dan cermat lagi dalam Verifikasi	31 Desember 2025	-	Proses
10	Pihak ketiga terlambat menyelesaikan pekerjaan/pemenuhan barang	ROO.23.99.47.10	1 Januari s/d 31 Desember 2025	tidak ada pengendalian pengawasan dalam kemajuan kegiatan yang dilakukan	Banyak Pekerjaan yang terlambat	Proses	Mewajibkan pihak ketiga mengirimkan laporan kemajuan (harian/mingguan/bulanan)	31 Desember 2025	=	Proses

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 1 dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana